****

**Republik Indonesia**

**Standar Dokumen Pemilihan**

|  |
| --- |
| **Pengadaan****Jasa Konsultansi****Perorangan** |

**- Pengadaan Langsung -**

*[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]*

**Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

**untuk**

**Pengadaan**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pejabat Pengadaan pada: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Tahun Anggaran: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

DAFTAR ISI

[BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG 1](#_Toc529508897)

[BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) 2](#_Toc529508898)

[A. UMUM 2](#_Toc529508899)

[1. Lingkup Pekerjaan 2](#_Toc529508900)

[2. Sumber Dana 2](#_Toc529508901)

[3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi 2](#_Toc529508902)

[4. Larangan Pertentangan Kepentingan 2](#_Toc529508903)

[B. PERSYARATAN KUALIFIKASI 3](#_Toc529508904)

[5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta 3](#_Toc529508905)

[6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta 3](#_Toc529508906)

[C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 3](#_Toc529508907)

[7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung 3](#_Toc529508908)

[D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 3](#_Toc529508909)

[8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi 3](#_Toc529508910)

[9. Penyampaian Dokumen Penawaran 5](#_Toc529508911)

[10. Pembukaan Penawaran 5](#_Toc529508912)

[11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran 5](#_Toc529508913)

[12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung 6](#_Toc529508914)

[13. Penerbitan SPPBJ 6](#_Toc529508915)

[14. Penandatangan-an SPK 7](#_Toc529508916)

[BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 8](#_Toc529508917)

[1. LINGKUP PEKERJAAN 8](#_Toc529508918)

[2. SUMBER DANA 8](#_Toc529508919)

[8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI 8](#_Toc529508920)

[BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 9](#_Toc529508921)

[1. Latar Belakang 9](#_Toc529508922)

[2. Maksud dan Tujuan 9](#_Toc529508923)

[3. Sasaran 9](#_Toc529508924)

[4. Lokasi Kegiatan 9](#_Toc529508925)

[5. Sumber Pendanaan 9](#_Toc529508926)

[6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen 9](#_Toc529508927)

[7. Data Dasar 9](#_Toc529508928)

[8. Standar Teknis 9](#_Toc529508929)

[9. Studi-Studi Terdahulu 9](#_Toc529508930)

[10. Referensi Hukum 9](#_Toc529508931)

[11. Lingkup Kegiatan 9](#_Toc529508932)

[12. Keluaran 9](#_Toc529508933)

[13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen 9](#_Toc529508934)

[14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi 9](#_Toc529508935)

[15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa 9](#_Toc529508936)

[16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 10](#_Toc529508937)

[17. Personil 10](#_Toc529508938)

[18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 10](#_Toc529508939)

[19. Laporan Pendahuluan 10](#_Toc529508940)

[20. Laporan Bulanan 10](#_Toc529508941)

[21. Laporan Antara 10](#_Toc529508942)

[22. Laporan Akhir 10](#_Toc529508943)

[23. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan 10](#_Toc529508944)

[24. Alih Pengetahuan 10](#_Toc529508945)

[BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN 11](#_Toc529508946)

[A. BENTUK SURAT PENAWARAN 11](#_Toc529508947)

[B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 12](#_Toc529508948)

[C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA 20](#_Toc529508949)

[BAB VI. PAKTA INTEGRITAS 22](#_Toc529508950)

[BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI 23](#_Toc529508951)

[BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 26](#_Toc529508952)

[BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN 32](#_Toc529508953)

[A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA 32](#_Toc529508954)

[B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA 33](#_Toc529508955)

# BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *[kop surat K/L/PD]*Nomor : \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_Lampiran : 1 (satu) berkasKepada Yth.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pada *\_\_\_\_\_\_\_\_[K/L/PD] Tahun Anggaran \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:1. **Paket Pengadaan**

Nama paket pengadaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Lingkup pekerjaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nilai total HPS : Rp\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)Sumber pendanaan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tahun Anggaran \_\_\_\_1. **Pelaksanaan Pengadaan**

Tempat dan alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]**Telepon/Fax* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Website* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Hari/Tanggal | Waktu |
|  | Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran | \_\_/\_\_\_\_s.d.\_\_/\_\_ | \_\_\_\_s.d.\_\_ |
|  | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Penandatanganan SPK | \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.Demikian disampaikan untuk diketahui.Pejabat Pengadaan pada *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[K/L/PD]**[tanda tangan]**...........................**[nama lengkap]* |

# BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

|  |
| --- |
| A. UMUM |
| Lingkup Pekerjaan | 1. Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
4. Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
5. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak.
6. Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
7. Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
8. Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
9. Website Satuan Kerja/Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
10. Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
 |
| Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:1. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
2. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.
 |
| Larangan Pertentangan Kepentingan  | 1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:
	1. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
	2. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
3. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
 |
| PERSYARATAN KUALIFIKASI |
| Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta | Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi: 1. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu
2. Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
4. menandatangani Pakta Integritas; dan
5. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
6. tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
7. keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan;
8. kepentingan pihak yang terkait;
9. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
10. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 |
| Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta | Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, meliputi:1. Memiliki pengalaman:
2. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
3. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
4. Jenjang pendidikan;
5. Memiliki sertifikat keahlian/teknis;
6. Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau
7. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
 |
| DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG |
| Isi Dokumen Pengadaan Langsung | Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :1. Undangan Pengadaan Langsung;
2. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
3. Lembar Data Pemilihan (LDP);
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
5. Bentuk Dokumen Penawaran:
6. Pakta Integritas;
7. Formulir Isian Kualifikasi; dan
8. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
 |
|  PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN |
| Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | * 1. Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
	2. Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:

Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :1. tanggal;
2. masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
3. harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4. tanda tangan oleh :

direktur utama/pimpinan perusahaan; penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; ataukepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);* 1. Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk badan usaha terdiri dari*:*
1. unsur pengalaman, yang terdiri dari sub unsur:
2. pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis;
3. pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama;
4. Nilai pengalaman mengelola kontrak; dan
5. Kemampuan menyediakan fasilitas utama (apabila diperlukan).
6. Unsur Proposal Teknis, yang terdiri dari sub unsur :
7. Pendekatan teknis dan metodologi:
8. Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam KAK;
9. Kualitas metodologi yang menggambarkan:
10. Ketepatan Analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang diusulkan
11. Inovasi
12. Dukungan data
13. Rencana kerja:
14. Program kerja,
15. jadwal kerja, dan
16. jangka waktu pelaksanaan;
17. Unsur Kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur :
18. Tingkat pendidikan;
19. Pengalaman profesional;
20. Sertifikasi profesional (apabila diperlukan);
21. Penguasaan bahasa asing (apabila diperlukan);
22. Penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan); dan
23. Pengenalan situasi dan kondisi setempat (apabila diperlukan)
	1. Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga penawaran yang terdiri dari:
24. Rekapitulasi penawaran biaya;
25. Rincian biaya langung personel;
26. Rincian biaya langsung non-personel.
	1. Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
 |
| 1. **PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN**
 |
| Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung |
| 1. **PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI**
 |
| Pembukaan Penawaran  | * 1. Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
	2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
	3. Surat penawaran
	4. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
	5. Dokumen penawaran teknis;
	6. Dokumen penawaran harga;
	7. Pakta Integritas; dan
	8. Formulir Isian Kualifikasi.
 |
| Evaluasi dan Negosiasi Penawaran | * 1. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
	2. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
	3. evaluasi teknis; dan
	4. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
	5. Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
	6. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
2. mencantumkan penawaran harga;
3. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
4. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
	1. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
	2. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
	3. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
	4. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, seseuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
	5. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
	6. Evaluasi Teknis :
	7. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
	8. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK;
	9. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
	10. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK;
	11. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
	12. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
	13. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
5. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
6. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
7. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.
 |
| Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung  | 1. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
3. tanggal dibuatnya Berita Acara
4. Nama dan alamat peserta;
5. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
6. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
7. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).
 |
| 1. **PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK**
 |
| Penerbitan SPPBJ | 1. Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
2. PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
3. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
4. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
5. Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
6. PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
7. Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
8. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
 |
| Penandatangan-an SPK | 1. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
2. Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:* 1. SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
	2. SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.1. Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).
 |

#

# BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

**LEMBAR DATA PEMILIHAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bagian IKP** | **No. IKP** | **Isian Ketentuan** |
| LINGKUP PEKERJAAN | 1.1 | Kode RUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.2 | Nama paket pengadaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.3 | Uraian singkat paket pengadaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas* *pekerjaan yang akan dilaksanakan]* |
| 1.4 | Jenis Kontrak yang digunakan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[diisi dengan Kontrak Lumsum/Waktu Penugasan]* |
| 1.6 | Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.7 | Nama Pejabat Pengadaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[diisi nama Pejabat Pengadaan, contoh: Pejabat Pengadaan Sekretariat Utama LKPP]* |
| 1.8 | Alamat Pejabat Pengadaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.9 | *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.10 | *Website* Aplikasi SPSE *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *[contoh: lpse.lkpp.go.id]* |
| SUMBER DANA |  | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA \_\_\_\_\_ *[Satuan Kerja]* Tahun Anggaran \_\_\_\_*[diisi sumber dana dan tahun anggaran yang sesuai* *dokumen anggaran]* |
| DOKUMEN PENAWARAN DANKUALIFIKASI | 8.2.a | Masa berlaku surat penawaran:\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender*[diisi waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan Langsung* *sampai dengan penandatanganan SPK]* |

# BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

|  |
| --- |
| **Uraian Pendahuluan[[1]](#footnote-1)** |
| Latar Belakang |  |
| Maksud dan Tujuan |  |
| Sasaran |  |
| Lokasi Kegiatan |  |
| Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Satuan Kerja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Data Penunjang[[2]](#footnote-2)** |
| Data Dasar |  |
| Standar Teknis |  |
| Studi-Studi Terdahulu |  |
| Referensi Hukum |  |
| **Ruang Lingkup** |
| Lingkup Kegiatan |  |
| Keluaran[[3]](#footnote-3) |  |
| Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen |  |
| Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi |  |
| Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa |  |
| Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan |  |
| Personil | Posisi | Kualifikasi | Jumlah Orang Bulan |
| Tenaga Ahli: |
|  |  |  |
| Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan |  |
| **Laporan** |
| Laporan Pendahuluan | Laporan Pendahuluan memuat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) buku laporan. |
| Laporan Bulanan | Laporan Bulanan memuat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) buku laporan. |
| Laporan Antara | Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) buku laporan. |
| Laporan Akhir | Laporan Akhir memuat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan). |
| **Hal-Hal Lain** |
| Pedoman Pengumpulan Data Lapangan | Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: |
| Alih Pengetahuan | Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: |

# BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

## BENTUK SURAT PENAWARAN

 *[Kop Surat]*

Nomor : \_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan pada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[K/L/PD]*

di

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Perihal : Penawaran Pengadaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[diisi nama pekerjaan]*

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[diisi nama pekerjaan]* sebesar Rp\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

*Penyedia,*

..........................

Nama Lengkap

## BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

#### BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form T-1)

Form T-1 ini digunakan untuk mencantumkan pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.

**DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS**

**10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Paket Pekerjaan** | **Tahun** | **Nilai**  | **Instansi Pengguna** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Keterangan isi kolom :

Nomor urut

Nama paket pekerjaan

Tahun

Nilai kontrak pekerjaan

Nama instansi pengguna jasa

#### BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form T-2)

Form T-2 ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman yang dicantumkan dalam Form T-1.

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS**

**10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Pengguna Jasa
 | : |  |
| 1. Nama Perusahaan
 | : |  |
| 1. Nama Paket Pekerjaan
 | : |  |
| 1. Lingkup Pekerjaan
 | : |  |
| 1. Lokasi Kegiatan
 | : |  |
| 1. Nilai Kontrak
 | : |  |
| 1. No. Kontrak
 | : |  |
| 1. Waktu Pelaksanaan
 | : |  |
| 1. Posisi Penugasan
 | : |  |
| 1. Status Kepegawaian pada Perusahaan
 | : |  |
| 1. Surat Referensi dari Pengguna Jasa
 | : |  |

#### BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-3)

1. **TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA**

*[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda. Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]*

1. **TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK**

*[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personel/fasilitas pendukung oleh PPK sesuai dengan Dokumen Seleksi ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]*

#### BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-4)

*[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab berikut:*

1. *Pendekatan Teknis dan Metodologi,*
2. *Rencana Kerja, dan*

*a) Pendekatan Teknis dan Metodologi. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.*

*b) Rencana Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan, substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.*

#### BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (Form T-5)

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan 1 | Bulan ke-2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **n** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan:

Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya

Jangkawaktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok*.*

#### BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI (Form T-6)

**Daftar Riwayat Hidup**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Posisi yang diusulkan | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Nama Personel | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Tempat/Tanggal Lahir | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar,dilampirkan rekaman ijazah) | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Pendidikan Non Formal | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Penguasaan Bahasa :* 1. Bahasa Indonesia
	2. Bahasa Inggris
	3. Bahasa Setempat
 | ::: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  Pengalaman Kerja1  |  |  |
|  | Tahun ini \_\_\_\_ |  |  |
|  | 1. Nama Kegiatan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Lokasi Kegiatan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Pengguna Jasa
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Nama Perusahaan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Uraian Tugas
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Waktu Pelaksanaan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Posisi Penugasan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Status Kepegawaian pada Perusahaan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Surat Referensi dari Pengguna Jasa
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Tahun \_\_\_\_ |  |  |
|  | 1. Nama Kegiatan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Lokasi Kegiatan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Pengguna Jasa
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Nama Perusahaan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Uraian Tugas
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Waktu Pelaksanaan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Posisi Penugasan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Status Kepegawaian pada Perusahaan
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | 1. Surat Referensi dari Pengguna Jasa
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan

Pernyataan:

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
2. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;
3. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
4. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
5. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_20\_\_ |
|  |  | Yang membuat pernyataan,(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*[nama jelas]* |

#### BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN (Form T-7)

**PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ untuk Penyedia Jasa Konsultansi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sampai dengan bulan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dengan posisi sebagai tenaga ahli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_20\_\_

Yang membuat pernyataan,

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*[nama jelas]*

## BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

#### BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA (Form B-1)

**REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Total Harga** **(Rp)** |
| I | Biaya Langsung Personel |  |
| II | Biaya Langsung Non-Personel |  |
|  | Sub-total |  |
|  | PPN 10% |  |
|  |  Total |  |
| Terbilang:  |

#### BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2)

**RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Personel** | **Posisi** | **Orang Bulan** | **Remunerasi (Rp)** | **Jumlah****(Rp)** |
| **Tenaga Ahli** |
|  |  |  |  |  |
| **Total Remunerasi** |  |

#### BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3)

**RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL
(DIRECT REIMBURSEABLE COST)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Biaya** | **Uraian Biaya** | **Satuan** | ***Volume*** | **Biaya1 (Rp)** | **Jumlah****(Rp)** |
| **Biaya Laporan** | Laporan Pendahuluan |  |  |  |  |
|  | Laporan Antara |  |  |  |  |
|  | Laporan Akhir |  |  |  |  |
|  | Laporan Penyelengaraan Seminar |  |  |  |  |
|  | Biaya Laporan Lainnya |  |  |  |  |
| **Biaya Lainnya** |  |  |  |  |  |

Keterangan:

Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (*at cost*), harga satuan, atau lumsum.

# BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| No. Identitas | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]* |
| Alamat | :  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pekerjaan | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*isi sesuai dengan* *K/L/PD*] dengan ini menyatakan bahwa: |

* + 1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
		2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
		3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
		4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[tempat]*, \_\_*[tanggal]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[bulan]* \_\_*\_\_\_\_[tahun]*

*[Nama Peserta]*

 *[tanda tangan]*,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[nama lengkap]*

# BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[diisi nama perorangan]* |
| No. Identitas | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]* |
| Alamat | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[diisi dengan alamat sesuai KTP/SIM/Paspor]* |
| Telepon/Fax | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Email | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;

1. saya bukan sebagai pegawai *Kementrarian/Lembaga/Perangkat Daerah* *[bagi pegawai Kementrarian/Lembaga/Perangkat Daerah* *yang sedang cuti diluar tanggungan negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementrarian/Lembaga/Perangkat Daerah* *yang sedang cuti diluar tanggungan negara”]*;
2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
4. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

1. data-data saya adalah sebagai berikut:
2. **Data Administrasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | Alamat sesuai kartu identitas | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Alamat Domisili | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | No. Telepon | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5. | No. Fax | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6. | E-mail | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Izin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 | : | No\_\_\_\_\_\_\_Tanggal \_\_\_\_\_\_ |
| 1. Masa berlaku izin
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Instansi pemberi izin
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Data Keuangan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak
 | : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)
 | : | No.\_\_\_\_\_\_tanggal \_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan (apabila diperlukan)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan | Jumlah | Kapasitas atau *output* pada saat ini | Merk dan tipe | Tahun pembuatan | Kondisi(%) | LokasiSekarang | Bukti Status Kepemilikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Data Pengalaman Pekerjaan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  No. |  Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan |  Lokasi | Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen | Kontrak  | Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan |
|  | Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai | Kontrak | BA Serah Terima |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Pekerjaan | ringkasan lingkup pekerjaan | Lokasi | Pemberi Pekerjaan | Kontrak | Progres Terakhir |
| Nama | Alamat/ Telepon | No/ Tanggal | Nilai | Kontrak (Rencana)(%) | Prestasi Kerja (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 *[tempat]*,  *[tanggal] [bulan] \_\_\_\_\_ [tahun]*

*[rekatkan meterai Rp 6.000,-*

*tanda tangan]*

(*nama lengkap peserta*)

# BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

|  |  |
| --- | --- |
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| NOMOR DAN TANGGAL SPK : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama PPK: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama Penyedia: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| PAKET PENGADAAN : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| SUMBER DANA: *[sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tahun Anggaran \_\_\_\_ untuk mata anggaran kegiatan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rupiah). |
| Jenis Kontrak : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender |
| Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Pejabat Pembuat Komitmen*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]**[nama lengkap]**[jabatan]* | Untuk dan atas nama Penyedia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]**[nama lengkap]**[jabatan]* |
| **SYARAT UMUM****SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** |
| 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.1. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.1. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan1. BIAYA SPK
	* + - 1. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
				2. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
2. HAK KEPEMILIKAN
	* + - 1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
				2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
3. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.1. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.1. JADWAL
	1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
	2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
	3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
	4. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
2. ASURANSI
	* + - 1. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
3. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
4. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
	* + - 1. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.
5. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
	* + - 1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
6. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
7. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
8. kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
	* + - 1. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
				2. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.1. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
	* + - 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
				2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian*.*
				3. Laporan harian berisi:
2. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
4. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
5. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
6. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
	* + - 1. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
				2. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
				3. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
				4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan*.*
7. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
	* + - 1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
				2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
				3. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
				4. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
8. SERAH TERIMA PEKERJAAN
	* + - 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
				2. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
				3. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
				4. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
				5. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
				6. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.
9. PERUBAHAN SPK
	* + - 1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
				2. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
		1. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
		2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
		3. mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
		4. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
			+ 1. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
10. PERISTIWA KOMPENSASI
	* + - 1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
11. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
12. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
13. PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
14. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
15. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
16. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
17. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
18. ketentuan lain dalam SPK.
	* + - 1. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
				2. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
				3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
				4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
19. PERPANJANGAN WAKTU
	* + - 1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
				2. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
	* + - 1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
				2. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
21. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
22. biaya langsung demobilisasi personel.
	* + - 1. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
				2. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
23. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
24. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
25. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
26. penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
27. penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
28. penyedia berada dalam keadaan pailit;
29. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
30. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
31. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
32. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
	* + - 1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
33. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
34. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
35. penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
	* + - 1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
36. PEMBAYARAN
	* + - 1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
37. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
38. pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
39. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
	* + - 1. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
				2. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
				3. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
40. DENDA
	* + - 1. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
				2. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

 1. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.1. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. |

# BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

## BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

*[kop surat K/L/PD]*

Nomor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

Lampiran : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pejabat Penandatangan Kontrak

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

* + - 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[PA/KPA K/L/PD]*
			2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[APIP K/L/PD]*
			3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[Pejabat Pengadaan]*

......... *dst*

## BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

*[kop surat satuan kerja K/L/PD]*

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paket Pekerjaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nama Penyedia Jasa Konsultansi]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[alamat Penyedia Jasa Konsultansi]*

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Tanggal mulai kerja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK..

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pejabat Penandatangan Kontrak

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[nama Penyedia]*

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

1. Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. [↑](#footnote-ref-1)
2. Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. [↑](#footnote-ref-3)